

# SOCIAL INCLUSION DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DALAM OTONOMI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN

**Bambang Noorsetya<sup>1</sup>, Chandra Dinata<sup>2</sup>, Umi Chayatin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang

<sup>3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang

*e-mail: chand.dinata@unmer.ac.id*

## ABSTRAK

Pendahuluan. Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan social inclusion untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan triangulasi dengan FGD. Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Haberman. Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemiskinan local dapat diatasi sehingga jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-nilai sosial serta norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan kebijakan global dalam memerangi kemiskinan. Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat kebersamaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang.

**Kata Kunci:** *Institusi Sosial; Otonomi; Kemiskinan; Inklusi Sosial; Kesejahteraan*

## PENDAHULUAN

Prinsip pembangunan nasional secara harfiah adalah pembangunan yang muncul “dari”, dilakukan “oleh”, dan ditujukan “untuk” rakyat dalam semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi sosial dan budaya. Di era desentralisasi, pemerintah daerah berpacu untuk mengendalikan program

pembangunan untuk memerangi kemiskinan. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah di distribusikan hingga di daerah dengan berbagai pendekatan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang serta didukung dengan penganggaran yang berbasis pada masyarakat miskin (*pro poor policy*). Isu-isu tentang kemiskinan masih

menjadi *trending topic* bagi tujuan pembangunan global berkelanjutan. Kemiskinan bukan saja disebabkan oleh dimensi tunggal, melainkan disebabkan oleh beragam dimensi dalam kehidupan masyarakat (Belhadj & Limam, 2012; Betti, Cheli, Lemmi, & Verma, 2006; Betti, Cheli, Lemmi, & Verma, 2006; Suyanto, 2013), sehingga kemiskinan dapat diukur dari beragam indikator seperti ekonomi (Hanandita & Tampubolon, 2016; Kim, Mohanty, & Subramanian, 2016), redistribusi kekuatan sosial yang harus dikendalikan oleh negara (Hoedl, 2017), pendapatan dan penguasaan aset (Notten, 2016), kemampuan dalam mendapatkan akses layanan dasar (Khan, Saboor, Ali, Malik, & Mahmood, 2016), sehingga dalam upaya pengendaliannya dilakukan penguatan pada kelompok sasaran dengan pendekatan pemberdayaan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan multidimensional (Ahmad & Talib, 2015). Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan seluruh potensi lokal, termasuk sumberdaya sosial yang dimiliki untuk mewujudkan keadilan ekonomi (Alam, 2017).

Pengurangan angka kemiskinan yang dijadikan sebagai tujuan global tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu administrasi publik memiliki andil besar didalamnya. Tujuan rasional yang ada dalam ilmu administrasi publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kebijakan didalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik (Vries, 2016). Kesepakatan global yang dituangkan dalam deklarasi PBB di tahun 2000 bertujuan untuk menciptakan tatanan baru kehidupan masyarakat dunia yang berkeadilan (Annan, 2000) yang diterjemahkan secara implementatif melalui program-program pembangunan global (MDGs/Milenium

*Development Goals*) dengan delapan target utama yakni: *pertama*, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan; *kedua*, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua masyarakat; *ketiga*, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; *keempat*, menurunkan angka kematian anak; *kelima*, meningkatkan kesehatan ibu; *keenam* memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; *ketujuh*, memastikan kelestarian lingkungan; dan *kedelapan*, mengembangkan kemitraan dalam pembangunan (UN, 2001). Komitmen global tersebut berakhir ditahun 2015 kemudian lahirlah kesepakatan baru dengan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 tujuan yakni: *a]. No poverty; b]. Zero hunger; c]. Good health and well being; d]. Quality education; e]. Gender equality; f]. Clean water and sanitation; g]. Affordable and clean energy; h]. Decent work and economic growth; i]. Industry, innovation, and infrastructure; j]. Reduced inequality; k]. Sustainable cities and communities; l]. Responsible consumption and production; m]. Climate action; n]. Life below water; o]. Life on land; p]. Peace, justice, and strong institutions; dan q]. Partnerships for the Goals* (WB, 2017).

Dari tahun 2000 hingga tahun 2015, masyarakat global mengimplementasikan komitmennya dalam penanggulangan kemiskinan dengan beragam pendekatan seperti pendekatan kesehatan yang ditingkatkan melalui program-program pemerintah (Krutilová & Hazuchová, 2019) yang dianggarkan melalui belanja public untuk masyarakat miskin (Sasmal & Sasmal, 2016) dalam rangka menstimulasi keratifitas dan produktifitas masyarakat, terutama bagi kelompok perempuan (Hussain, Mahmood, & Scott, 2018) yang dikembangkan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha

mikro (Miled & Rejeb, 2015). Dari rangkaian usaha-usaha dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, program-program dijalankan masih bertumpu pada pemerintah (*government*) sehingga belum mampu untuk membangun sebuah pemahaman baru dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi urusan bersama semua pihak dengan penyebab yang multi dimensi (Alkire & Seth, 2015). Pencanaan program penanggulangan kemiskinan yang masih bertumpu pada pemerintah menghasilkan interkasi implementasi program yang *linear* dan tidak *parallel* dalam melibatkan semua pihak, sehingga jalannya program penanggulangan kemiskinan global belum tercapai secara maksimal (Sachs, 2012). Padahal dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, pemerintah dituntut untuk senantiasa sensitif dalam setiap perubahan-perubahan lingkungan, terutama lingkungan global dengan kebijakan-kebijakan ekonominya yang dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan masyarakat miskin di satu negara (Smeru, 2017).

Gagasan tentang *social inclusion* yang dihasilkan dari pola interkasi sosial masyarakat dengan kelembagaan sosial yang dimiliki menjadi topic utama dalam artikel ini ditujukan untuk memperkaya pengetahuan tentang penanggulangan kemiskinan yang selama ini masih menggunakan pendekatan struktural-fungsional, sehingga implementasi program-program yang dicanangkan secara *top down* oleh pemerintah belum mampu membangun kesadaran bersama dengan *local value* yang dimiliki untuk menjalankan agenda-agenda penanggulangan kemiskinan nasional maupun global.

Pergeseran pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi

tanggungjawab bersama harus dibangun dari kesadaran komunal, terutama pada kelompok masyarakat yang digerakkan dengan *local value* di pedesaan. Dengan demikian persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi dengan membangun pemahaman baru tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menguatkan kelembagaan sosial di masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan, agar terbangun sebuah tatanan masyarakat berkepedulian.

Artikel ini akan mendiskusikan pendekatan inklusi sosial (*social inclusion*) dalam menanggulangi kemiskinan di daerah dengan menguatkan kelembagaan sosial masyarakat (*social institution*), dalam hal ini Kabupaten Malang sebagai objek kajian. Pendekatan inklusi sosial tersebut dapat dijadikan sebagai “energi” dalam menjalankan agenda global untuk menanggulangi kemiskinan yang selama ini masih *concern* dengan pendekatan struktural-fungsionalnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Pada prinsipnya, terdapat banyak literature yang mengkaji tentang penanggulangan kemiskinan dengan beragam pendekatan. Keragaman sumberdaya yang dimiliki oleh setiap level pemerintahan (pusat dan daerah) menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun *masterplan* program-program penanggulangan kemiskinan (Gurtoo & Udayaadithya, 2014) sehingga dapat menyamakan persepsi lintas actor untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat, terutama pada tingkatan produktifitas pada sektor pertanian, industri, dan jasa didukung dengan sistem pelayanan yang dapat berimplikasi terhadap kemiskinan (Ivanic & Martin, 2017) untuk itulah sistem penganggaran pemerintah yang

terdistribusi kepada kelompok masyarakat miskin yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing level pemerintah (Nursini & Tawakkal, 2019). Dengan demikian pendekatan ekonomi yang digunakan bertumpu pada penyempurnaan moda produksi yang menjadi titik tekan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan menggeser *mindset* kelompok masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan pengembangan kemampuan terfasilitasi oleh negara melalui pendekatan pemberdayaan (Alam, 2017) sehingga terjadi interaksi lintas actor yang memiliki tanggungjawab dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun demikian, interaksi yang terbangun tersebut masih pada taraf interaksi antara pemerintah dan masyarakat, untuk actor *private* masih bersifat semu (Larantika, Zauhar, Makmur, & Setyowati, 2017).

Banyak hal yang menarik ketika mendiskusikan tentang penanggulangan kemiskinan di berbagai negara di dunia, seperti halnya di Ghana. Kemiskinan dipandang dari sudut kualitas kehidupan masyarakat (Fuseini, Enu-Kwesi, & Sulemana, 2019) yang dapat melemahkan produktifitas (Ivanic & Martin, 2017) sehingga menuntut pemerintah untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengarahkan sumberdaya ekonomi pada program peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan agar masyarakat miskin dapat meningkatkan produktifitasnya hingga mampu keluar dari garis kemiskinan (Fuseini, Enu-Kwesi, & Sulemana, 2019).

Dalam konteks lain, partisipasi dan keterlibatan kelompok masyarakat miskin menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kemampuan individu dalam mengelola

sumberdaya yang dimiliki agar dapat *survive* secara ekonomi dan sosial. Spirit kebersamaan (*komunalisme*) menjadi pengaruh yang kuat didalam menjalankan seluruh rangkaian kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan (Ndaguba & Hanyane, 2019) sehingga berbanding terbalik dengan isu-isu tentang gender yang melahirkan program berbasis pada penguatan ekonomi kelompok perempuan (Lesetedi, 2018) justru akan berdampak pada pembentukan sebuah komunitas eksklusif dalam penanggulangan kemiskinan yang harus diwaspadai oleh pemerintah.

Dari rangkaian diskusi tentang hasil penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa beragam upaya dilakukan oleh pemerintah secara struktur dengan stimulasi anggaran yang diarahkan pada pengembangan kapasitas kelompok masyarakat miskin. Di Indonesia, pasca krisis multidimensi memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan meroket tajam hingga 24,23% atau sejumlah 49,5 juta jiwa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 17,47% (TNP2K, 2015). Komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tersebut disusun dalam sebuah strategi yang terintegratif sehingga lahir program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di tahun 2007-2011 sebagai hasil dari integrasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tahun 1997-1998. Dan hingga saat ini integrasi program penanggulangan kemiskinan tampak pada kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah berpedoman pada prinsip pemberdayaan masyarakat miskin (TNP2K, 2015). Meskipun demikian, komitmen penanggulangan kemiskinan masih bertumpu pada pemerintah sebagai actor utama. Kolaborasi dalam penanggulangan

kemiskinan masih pada tataran struktur, belum mampu membangun tatanilai dalam kolaborasi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam penanggulangan kemiskinan, terutama pada actor-aktor *private* (Larantika, Zauhar, Makmur, & Setyowati, 2017) yang terlembaga dengan seluruh sumberdaya local yang dimiliki untuk membuka ruang-ruang partisipatif bagi kelompok masyarakat miskin (Hayami, 2001; Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009) untuk memanfaatkan modal pembangunan seperti manusia, alam, dan sosial (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009).

Dalam konteks lain, kelembagaan sosial masyarakat digerakkan oleh pranata sosial yang biasanya dikenal dalam wujud kegotongroyongan, sambatan, bersih dusun dan lain sebagainya sebagai ‘penciri’ dari satu kelompok masyarakat. Keberadaan institusi sosial tersebut biasanya juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat lokal dalam mendorong pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai contoh yang terjadi di Spanyol misalnya, transformasi masyarakat dalam satu kelompok mampu untuk mendorong kebersamaan sehingga memiliki karakter dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama untuk menangani isu-isu kemiskinan (Lizardo, 2005). Proses transformasi masyarakat tersebut merupakan sebuah proses kristalisasi nilai-nilai lokal dan adat lokal yang dapat bergerak untuk *berkomufase* menjadi sebuah institusi yang kuat dan mampu mempengaruhi kelompok lainnya (Grootaert & Bastelaer, 2002).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana *social inclusion* dan kelembagaan sosial dapat menjadi kekuatan dalam penanggulangan kemiskinan di era

desentralisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab persoalan, Data yang diperoleh dianalisa secara interaktif untuk mendapatkan sebuah pemahaman atas konteks penelitian. Masing-masing data, baik primer maupun sekunder diinterpretasikan secara naratif untuk menggambarkan fakta-fakta dilapangan. Sementara itu, *FGD* dilaksanakan dalam penelitian ini dijadikan sebagai instrument untuk memperdalam informasi dan sekaligus membangun sebuah pemahaman yang terkonfirmasi kebenarannya secara langsung terhadap actor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan di Indonesia didominasi pada masyarakat yang hidup di pedesaan. Ditahun 2018, data kemiskinan pedesaan mencapai 15,54 juta jiwa atau sejumlah 13,10% dari jumlah penduduk disbanding dengan masyarakat miskin di perkotaan yang hanya berada pada angka 6,89% atau sejumlah 10,13 juta jiwa (BPS, 2019). Di Kabupaten Malang, yang memiliki sejumlah 378 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 Kecamatan, dengan luas wilayah secara administratif 3.526 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan sebesar 702,12 jiwa/km<sup>2</sup> dari jumlah penduduk total di tahun 2018 sebanyak 2.591.795 jiwa. Dari pertumbuhan penduduk tersebut terdapat angka kemiskinan dengan tingkat garis kemiskinan rata-rata tahun 2015-2018 sejumlah 289.504 (Rp/Kapita/Perbulan), sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Malang ditahun 2018 sejumlah 268.490 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2015-2018, terdapat penurunan rata-rata sebesar 11,11%

dari total masyarakat miskin di tahun 2015 sejumlah 292.870 jiwa.

Dari deskripsi data tersebut, Kabupaten Malang membangun komitmen dalam upaya penganggulangan kemiskinan dengan menimbang prinsip-prinsip yang menjadi komitmen nasional dalam menanggulangi kemiskinan di daerah seperti perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; meningkatkan akses pelayanan dasar; memberdayakan kelompok masyarakat miskin; dan kebijakan pembangunan inklusif (TNP2K, 2011). Secara implementatif, Kabupaten Malang menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk membuka ruang anggaran dalam setiap prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan. Berbekal dengan sejarah kejayaan di era kerajaan singosari, menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki peradaban, baik budaya, sosial, dan politik. Situs sejarah sebagai peninggalan masa lampu seperti “candi badut”, “candi jago”, “candi kidal”, dan “candi singosari” memiliki daya tarik sosial sehingga mampu menjadi perekat dan sekaligus sebagai pemikat masyarakat secara komunal dalam membaca, menyikapi, dan mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dialami oleh masyarakat, terutama persoalan kemiskinan. Dalam konteks implementasi program penanggulangan kemiskinan di daerah, upaya menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang menuaikan hasil, dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 0,16% setiap tahunnya dari tahun 2015-2018. Meskipun demikian, angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Timur, Kabupaten Malang masih menjadi kantong kemiskinan.

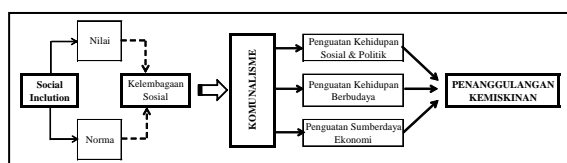
Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan senantiasa

berpedoman pada sumberdaya local masyarakat yang sejak dulu telah berkembang dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009). Spirit kegotong-royongan masyarakat tercermin dalam setiap kegiatan sosial dan politik warga untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki. Cerminan tersebut tampak pada tumbuh berkembangnya unit-unit usaha mikro hingga pertengahan tahun 2019 mencapai 418.000 dalam berbagai produk tersebar di 378 desa. Selain usaha mikro, kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang pariwisata (pokdarwis) tumbuh dan memiliki kelembagaan yang baik sebanyak 42 lembaga di tahun 2018 tersebar di 33 kecamatan di Kabupten Malang. Tentunya komitmen ini didorong oleh kekuatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan, kemudian dijadikan sebagai modal penguatan kapasitas kelembagaan yang didampingi oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.

Beberapa fakta yang didiskusikan diatas menunjukkan bahwa kelembagaan sosial mampu untuk menjadikan kelompok masyarakat miskin menjadi partisipan dalam pembangunan. *Social inclusion* yang menjadi kekuatan dalam membangun sebuah kebersamaan dan kesetaraan setiap elemen masyarakat mampu untuk menghasilkan gagasan sosial ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa secara kelembagaan ekonomi, dari 378 desa, telah terbentuk sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) sejumlah 203 unit hingga tahun 2019. Gambar dibawah ini dapat menjelaskan bahwa *social inclusion* dengan tatanan nilai dan norma dalam kelompok masyarakat dapat memperkuat kelembagaan



sosial sehingga proses pembentukan “komunalisme” dalam kelompok masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi pada kelompok masyarakat.



Gambar 1. Role Model Penanggulangan Kemiskinan dengan *Social Inclusion*

Dalam kajian *World Bank* pada dasarnya *social inclusion* merupakan integrasi kehidupan sosial masyarakat dengan identitas sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam satu wilayah tertentu (WB, 2013). Kesetaraan dan kebersamaan menjadi nilai utama dalam membentuk sebuah kelompok yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Dalam konteks kemiskinan di Kabupaten Malang, spirit kebersamaan dalam keterikatan kelembagaan mampu membentuk satu tujuan bersama dengan menguatkan kehidupan sosial dan politik untuk mengarahkan kelompok masyarakat miskin berpartisipasi dalam setiap agenda pembuatan kebijakan serta partisipasi politik tanpa membedakan suku, ras, agama, pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya. Kentalnya kekuatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan dapat membuka ruang demokrasi yang kuat terhadap berkembangnya kelembagaan sosial.

Sebagai identitas lokal, kelembagaan sosial yang melahirkan semangat kebersamaan dalam hal pengembangan kehidupan berbudaya pada tataran masyarakat pedesaan yang *naturalistik*. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat yang

berbudaya tersebut menjadi ‘magnet’ bagi pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal. BUMDes yang terbentuk diarahkan pada pengembangan ekonomi dengan destinasi wisata berbasis lokal untuk dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan bersama, terlebih untuk menguatkan keberadaan masyarakat pedesaan dengan keragaman sumberdaya lokal yang dimiliki (*self governing community*). Hal inilah yang menjadi penekanan didalam penanggulangan kemiskinan dalam era desentralisasi, daerah harus mampu menterjemahkan kebutuhan dan kekuatan-kekuatan sosial dari kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat pada wilayah teritorialnya. Dan masyarakat dengan komunalisme yang dimiliki mampu untuk memahami kebutuhan serta standar kehidupannya sendiri secara sosial, politik, dan ekonomi sehingga dapat menyelesaikan segala persoalan, baik sosial, politik, maupun ekonomi secara masif dengan nilai-nilai luhur yang telah dimilikinya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Beragam pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan oleh pemerintah dengan berpedoman pada kesepakatan global, namun yang menjadi penekanan dalam menanggulangi kemiskinan adalah membangun kepedulian bersama yang didukung oleh kelembagaan sosial yang lebih dahulu ada dan diakui keberadaannya oleh negara (asal usul). *Social inclusion* menjadikan komunalisme kehidupan masyarakat pedesaan semakin rekat dengan kelembagaan sosial yang sensitif dalam merespon persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pengembangan kelembagaan sosial dengan tatanan nilai dan norma

menghasilkan kekuatan besar untuk menggerakkan seluruh sumberdaya local secara partisipatif dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga komunalisme pada kelompok masyarakat pedesaan mampu menghadirkan kekuatan baru dalam kehidupan sosial dan politik, kehidupan berbudaya, dan kehidupan ekonomi sehingga masyarakat pedesaan dalam era otonomi dapat keluar dari zona kemiskinan local, nasional, dan bahkan global.

### Saran

Perlu menjadi perhatian bahwa penelitian ini sebatas mengeksplorasi *social inclusion* dan kelembagaan sosial untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pedesaan, oleh karena itu perlu kajian mendalam terkait dengan hubungan serta peran pemerintah daerah dalam mengeksplorasi kelembagaan sosial sebagai kerangka kerja kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Membangun kolaborasi bukan saja pada tataran struktural melainkan pada kelembagaan sosial menjadi penting dalam upaya mengimplementasikan komitmen penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan global.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Talib, N. (2015). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. *Qual Quant*, 49: DOI 10.1007/s11135-014-0025-8, 827–838.
- Alam, K. (2017). Poverty reduction through enabling factors. *World Journal of Science Technology and Sustainable Development*, Vol. 14(4), 310-321.
- Alkire, S., & Seth, S. (2015). Multidimensional Poverty Reduction in India between 1999 and 2006: Where and How??. *World Development*, Vol. 72, 93–108.
- Annan, K. (2000). *We the peoples of united nations in the 21st century*. New York: United Nations.
- Belhadj, B., & Limam, M. (2012). Unidimensional and multidimensional fuzzy poverty measures: New approach. *Economic Modelling*, Vol. 29, Issue 4, July, 995-1002.
- Betti, G., Cheli, B., Lemmi, A., & Verma, V. (2006). Multidimensional and Longitudinal Poverty: an Integrated Fuzzy Approach. Dalam A. Lemmi, & G. Betti, *Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement* (hal. 115-137). Boston: Springer.
- BPS. (2019). *Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXII tanggal 15 Januari: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- Fuseini, M. N., Enu-Kwesi, F., & Sulemana, M. (2019). Poverty reduction in Upper West Region, Ghana: role of the Livelihood Empowerment Against. *Development In Practice*, 1-14: <https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1586833>.
- Grootaert, C., & Bastelaer, T. v. (2002). *Understanding and measuring social capital: A multidisciplinary tool for practitioners*. Wasington DC: The World Bank.
- Gurtoo, A., & Udayaadithya. (2014). Welfare schemes in India: decentralization dynamics and stakeholder influences. *International Journal of Sociology and Social Policy*: Vol. 34, No. 3/4, 154-165.
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2016). Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013). *Soc Indic Res*, 128: DOI 10.1007/s11205-015-1044-0, 559–587.
- Hayami, Y. (2001). Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia. *The World Bank Research Observer*, Vol. 16, No. 2, 169–198.



- Hoedl, E. (2017). Economy and Society: Strategies for a More Equal Distribution of Societal Power. *CADMUS, Vol. 3(3)*, 142-151.
- Hussain, J., Mahmood, S., & Scott, J. (2018). Gender, microcredit and poverty alleviation in a developing country: the case of women entrepreneurs in Pakistan. *Journal of International Development: DOI: 10.1002/jid.3403*.
- Ivanic, M., & Martin, W. (2017). Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. *World Development 109*, 429–439.
- Khan, A., Saboor, A., Ali, I., Malik, W., & Mahmood, K. (2016). Urbanization of multidimensional poverty: empirical evidences from Pakistan. *Qual Quant, 50: DOI 10.1007/s11135-014-0157-x*, 439–469.
- Kim, R., Mohanty, S., & Subramanian, S. (2016). Multilevel Geographies of Poverty in India. *World Development, Vol. 87*.
- Krůtilová, V. K., & Hazuchová, N. (2019). Poverty predictors in the Czech Republic: do health predictors also matter? *Journal of Poverty and Social Justice, Vol. 27 (1)*, 79–94.
- Larantika, A. A., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation. *International Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 (3)*, 40-48.
- Lesetedi, G. N. (2018). A Theoretical Perspective on Women and Poverty in Botswana. *Journal of International Women's Studies, Vol. 19(5)*, 193-208.
- Lizardo, O. (2005). Can cultural capital theory be reconsidered in the light of world polity institutionalism? Evidence from Spain. *Poetics 33, Elsevier*, 81–110.
- Miled, K. B., & Rejeb, J.-E. B. (2015). Microfinance and Poverty Reduction: A Review and Synthesis of Empirical Evidence. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 195*, 705-712.
- Ndaguba, E. A., & Hanyane, B. (2019). Conceptualizing community economic development strategic framework for poverty alleviation: The case of Raymond Mhlaba Local Municipality. *Journal of Public Affairs, 1-8: DOI: 10.1002/pa.1929*.
- Notten, G. (2016). How Poverty Indicators Confound Poverty Reduction Evaluations: The Targeting Performance of Income Transfers in Europe. *Soc Indic Res, 127: DOI 10.1007/s11205-015-0996-4*, 1039–1056.
- Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology, Vol. 12(1)*, 270-285: doi:10.14254/2071-789X.2019/12-1/16.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press & Yayasan Obor Indonesia.
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. . *Viewpoint, No. 379*, 2206-2211.
- Sadeq, A. M. (1997). Poverty Allevation: An Islamic Persepective. *Humanomics, Vol. 13 (3)*, 110 - 134.
- Sasmal, R., & Sasmal, J. (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics, Vol. 43 (6)*, 604 - 618.
- Senadjki, A., & Sulaiman, J. (2015). An empirical study on the influence of Islamic values in poverty alleviation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 6 (2)*, 222-243.
- Smeru. (2017). Dari MDGS Ke SDGS: Memetik pelajaran dan menyiapkan langkah konkret. *Buletin SMERU No. 2/2017*, 1-20.

- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Pencegahannya: Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*. Malang: Intrans Publising.
- NP2K. (2011). *Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- TNP2K. (2015). *Integrating Community-Driven Development Principles into Policy: From PNPM Mandiri to the Village Law*. Jakarta: TNP2K-Secretariat of the Vice President of the Republic of Indonesia.
- UN. (2001, September 6). *United Nation: "UN Documentation: Development"*. Dipetik July 27, 2019, dari [www.un.org](http://www.un.org): <https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015>
- Vries, M. S. (2016). *Understanding Public Administration*. New York: Palgrave.
- WB. (2013). *Inclusion Matters: The Foundation of Shared Prosperity*. . Washington DC: World Bank.
- WB. (2017). *Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty*. Washington D.C.: World Bank Gorup